

BAB I

PENDAHULUAN

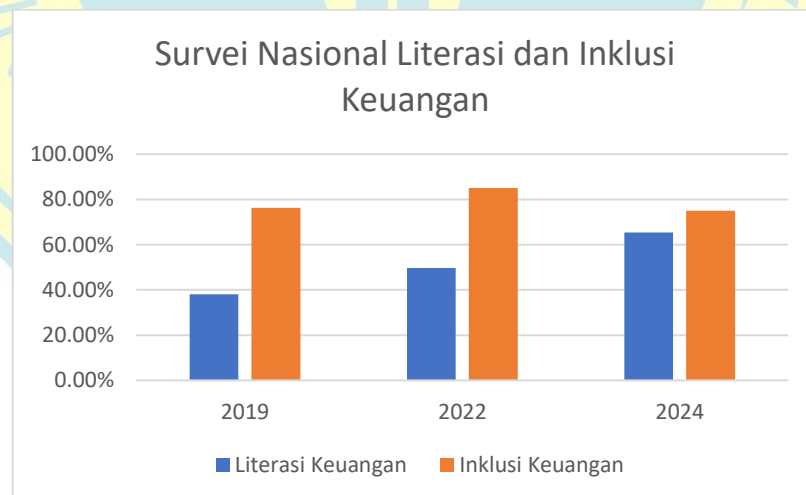
1.1 Latar Belakang Penelitian

Inklusi keuangan merupakan elemen krusial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan menjadi agenda utama di kancah internasional karena dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (Barajas et al., 2020). Inklusi keuangan yang merata diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Menurut Laeven dan Valencia melalui Sofiandi et al., (2023) akses yang merata terhadap produk dan layanan keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pembayaran digital, memungkinkan masyarakat untuk mengelola keuangan mereka secara efektif, mengurangi risiko keuangan, dan berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi.

Untuk menghadapi dinamika perekonomian global saat ini, setiap individu diharapkan mampu mengatur keuangan dengan efektif dan efisien. Karena pengelolaan keuangan yang bijak akan membentuk keputusan terhadap penggunaan atau pengalokasian dana yang dimiliki (Suwatno et al., 2020). Oleh karena itu, Widayati et al., (2023) berpendapat bahwa inklusivitas keuangan merupakan agenda penting khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Inovasi yang terus berkembang dalam teknologi keuangan yang secara progresif semakin mencakup berbagai lapisan masyarakat dipercaya akan mendorong perkembangan inklusi keuangan suatu negara (Ismamudi et al., 2023). Melalui

program Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNKI) pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kemudahan dalam mengakses layanan dan produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Menurut data yang diberikan oleh World Bank (2021), sekitar 76,2% populasi orang dewasa pada tingkat global memiliki akses ke rekening perbankan atau layanan keuangan lainnya, menunjukkan peningkatan dari 68,5% yang tercatat pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan upaya global untuk memperluas inklusi keuangan. Meskipun terjadi peningkatan, masih ada kesenjangan yang signifikan, terutama pada negara yang masih berkembang, di mana akses ke layanan keuangan tergolong terbatas oleh faktor-faktor seperti pendapatan, literasi keuangan, dan infrastruktur teknologi yang tidak merata (Adetunji et al., 2019).



Gambar 1.1 Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)

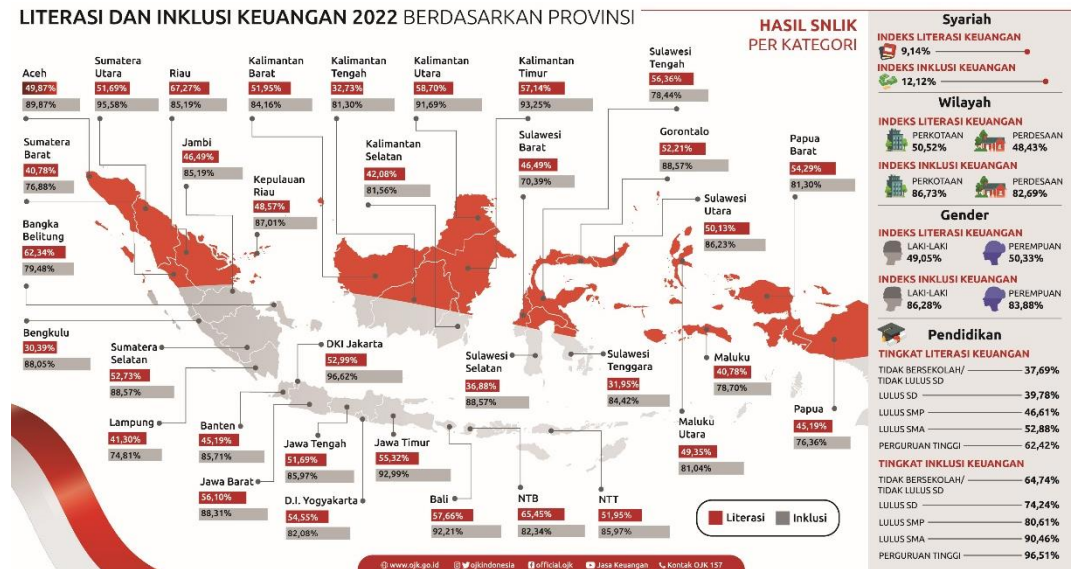
Sumber: Diolah oleh penulis

Data dari OJK & BPS (2024) yang merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) memperlihatkan bahwa Indonesia

mengalami penurunan indeks inklusi keuangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada 2019 angka indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 76,19%, yang kemudian meningkat menjadi 85,10 persen pada tahun 2022 (OJK & BPS, 2022). Terakhir, pada tahun 2023 indeks inklusi keuangan terus meningkat hingga 88,7 persen. Namun, pada tahun 2024 indeks inklusi keuangan turun menjadi 75,02%, yang berarti terjadi tren penurunan aksesibilitas terhadap produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya kemungkinan tantangan baru yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan di Indonesia, meskipun sebelumnya telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena penurunan indeks ini juga menjadi pengingat bahwa inklusi keuangan bukan hanya perkara menyediakan akses layanan keuangan, melainkan juga memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. DKI Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan serta produk keuangan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya data OJK & BPS (2022) yang mencatat indeks inklusi keuangan di Kota ini mencapai 96,62%.

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN 2022 BERDASARKAN PROVINSI



Gambar 1.2 Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Provinsi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, penduduk remaja dan dewasa rentang usia 15-59 tahun di Jakarta yang memiliki keterampilan TIK mencapai 93,98% (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia produktif di Jakarta sudah terbiasa menggunakan perangkat digital dan layanan berbasis teknologi, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan berbasis digital. Tingginya angka keterampilan TIK tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem perekonomian yang produktif dan efisien. Menurut Aprilia (2022) perkembangan TIK memberi kita peluang untuk menawarkan layanan keuangan khusus kepada kelompok demografis yang beragam, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan memiliki akses terbatas terhadap produk dan layanan keuangan. Di samping itu, masyarakat kini telah terbiasa menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

dukungan keterampilan TIK yang ada, diharapkan percepatan peningkatan inklusivitas keuangan di Indonesia dapat terwujud.

Berdasarkan Permenko No. 4 Tahun 2021 mengenai implementasi SNKI, terdapat tiga kategori dimensi yang digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan inklusi keuangan (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2021). Dimensi pertama adalah aksesibilitas, yaitu kemampuan individu dalam menggunakan produk keuangan, baik dari sisi kemudahan lokasi maupun keterjangkauan biaya. Kedua, penggunaan langsung atas layanan dan produk keuangan. Ketiga, indeks literasi keuangan, yang mengukur bagaimana masyarakat memahami dan menggunakan produk keuangan, digunakan untuk menilai sejauh mana produk dan layanan keuangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indeks literasi keuangan merupakan salah satu indikator utama pada keuangan inklusif yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk memahami, memilih, dan menggunakan produk keuangan secara bijak. Kemampuan literasi keuangan yang memadai, membantu individu dalam mengatur keuangannya secara lebih efektif, memahami risiko, serta mengakses produk keuangan formal yang lebih kompleks, seperti kredit, investasi, atau asuransi (Poddala, 2023). Meskipun infrastruktur layanan keuangan formal di Jakarta telah tersedia secara memadai, indeks literasi keuangan yang hanya mencapai 52,99% di tahun 2022 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jakarta yang tidak memanfaatkan produk-produk keuangan yang tersedia secara

optimal. Selaras dengan kondisi tersebut, meningkatkan literasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong inklusi keuangan secara agregat.

Selain literasi keuangan, perkembangan teknologi keuangan, khususnya pembayaran digital merupakan elemen yang berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Teknologi ini memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efektif, sehingga mengurangi hambatan akses ke layanan keuangan formal (Jange et al., 2024). Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah pengguna layanan pembayaran digital terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat menuju penggunaan teknologi keuangan yang lebih modern. Namun, untuk memanfaatkan teknologi ini secara maksimal, literasi digital yang baik juga dibutuhkan.

Menurut Somantri (2024) sistem keuangan antar provinsi di Indonesia tergolong eksklusif dan aksesnya masih didominasi oleh individu dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Meskipun pendapatan tinggi membantu meningkatkan inklusi keuangan, tetapi keadaan tersebut juga menciptakan kesenjangan dalam akses ke layanan keuangan formal. Bagi negara berkembang, peningkatan akses ke layanan keuangan kepada mayoritas masyarakat miskin yang tidak memiliki rekening bank merupakan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan pelaksanaan SNKI. Pernyataan ini didukung oleh Ponsree et al., (2021) yang menyebutkan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung lebih aktif dalam memanfaatkan layanan pembayaran digital dibandingkan kelompok pendapatan rendah.

Provinsi	Indeks Inklusi Keuangan	Gini Rasio
DKI Jakarta	96,62	0,412
Sumatera Utara	95,58	0,326
Kalimantan Timur	93,25	0,317
Jawa Timur	92,99	0,365
Bali	92,21	0,362
Kalimantan Utara	91,69	0,270
Sumatera Selatan	88,57	0,330
Gorontalo	88,57	0,423
Sulawesi Selatan	88,57	0,365
Jawa Barat	88,31	0,412

Gambar 1.3 Perbandingan Inklusi Keuangan dan Gini Rasio Berdasarkan Provinsi dengan Indeks Inklusi Keuangan Tertinggi

Sumber: hasil survei OJK 2022 dan BPS dalam Setyawan (2023)

Dibuktikan dengan data survei OJK tahun 2022, dimana indeks inklusi keuangan nasional Indonesia rata-rata ialah sebesar 85,10%. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi sebesar 96,62%. Namun, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini ratio Indonesia pada September 2022 mencapai 0,381, dengan DKI Jakarta termasuk dalam provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi ketiga (0,412) setelah Yogyakarta (0,459) dan Gorontalo (0,423). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi di DKI Jakarta tidak terdistribusi secara merata, yang berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan formal. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun provinsi ini memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, distribusi akses layanan keuangan masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian sebelumnya oleh Aprilia (2022) membahas tentang metode pembayaran non-tunai dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dipengaruhi

oleh tingkat literasi keuangan. Selain itu, penggunaan *cashless payment* juga terbukti meningkatkan inklusi keuangan, karena memudahkan ketersediaan layanan dan produk keuangan. Adapun penelitian oleh Patel et al., (2023) menyatakan bahwa pendidikan dan akses internet memainkan peran penting dalam memengaruhi kesenjangan adopsi penggunaan pembayaran digital, khususnya melalui *mobile banking*. Dengan demikian, penelitian Patel et al., (2023) memberikan perspektif baru mengenai pentingnya faktor akses teknologi dalam mengurangi kesenjangan inklusi keuangan melalui adopsi pembayaran digital.

Selain literasi keuangan dan adopsi pembayaran digital, faktor pendapatan juga memainkan peran dalam mempengaruhi tingkat inklusi keuangan. Penelitian Adetunji et al., (2019) di Nigeria menemukan bahwa meskipun literasi keuangan meningkatkan penggunaan layanan keuangan, tingkat pendapatan juga memengaruhi pola dan frekuensi tabungan terutama pada layanan keuangan. Rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah cenderung menabung di rumah atau bersama keluarga. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Temuan tersebut menyoroti pentingnya mempertimbangkan pendapatan sebagai variabel yang berpotensi memengaruhi inklusi keuangan.

Terlepas dari fakta bahwa DKI Jakarta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi di Indonesia dengan 96,62% menurut OJK & BPS (2022), angka ini mengisyaratkan mayoritas masyarakat telah terhubung dengan layanan keuangan. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa tingginya akses

tersebut tidak selalu menunjukkan bagaimana layanan keuangan digunakan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat. Penelitian oleh Aprilia (2022) mengenai korelasi metode pembayaran non-tunai dan literasi keuangan dengan inklusi keuangan di DKI Jakarta dengan populasi penggunaan *e-wallet*, sehingga hanya menyoroti aspek aksesibilitas. Inklusi keuangan yang diukur lebih banyak menekankan pada akses, tetapi belum sepenuhnya menilai seberapa baik penggunaan layanan keuangan formal, terutama di kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah atau tidak tahu banyak tentang keuangan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada akses inklusi keuangan dengan data lapangan yang menunjukkan bahwa akses saja tidak cukup untuk menciptakan inklusi keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya harus diukur dari kepemilikan akun keuangan digital tetapi juga dari seberapa besar *financial services* dapat diakses oleh berbagai golongan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Fenomena di DKI Jakarta yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tinggi (0,412) dan indeks inklusi keuangan tertinggi (96,62%), mencerminkan adanya distribusi akses layanan keuangan yang masih timpang. Fenomena ini juga memperkuat pernyataan Somantri (2024) bahwa sistem keuangan antar provinsi di Indonesia masih eksklusif dan mayoritas dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.

Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk mengisi gap empiris dalam literatur yang selama ini hanya menekankan pada akses formal ke

layanan keuangan, tanpa mempertimbangkan kualitas pemanfaatannya secara merata. Dengan menambahkan variabel pendapatan ke dalam analisis, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan baru yang lebih ekstensif mengenai bagaimana pendapatan berperan dalam menentukan inklusi keuangan yang berkualitas. Mengacu pada penjelasan di atas, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam terkait “Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Pembayaran Digital, dan Pendapatan terhadap Inklusi Keuangan di DKI Jakarta.” Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi baik praktis maupun teoretis dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas inklusi keuangan, khususnya di wilayah dengan indeks tinggi seperti DKI Jakarta.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan pembayaran digital terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh penggunaan pembayaran digital terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta.

3. Menganalisis pengaruh pendapatan terhadap inklusi keuangan di DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Temuan diharapkan dapat berguna sebagai studi literatur tentang unsur yang memengaruhi inklusi keuangan, terutama dengan mengintegrasikan variabel literasi keuangan, penggunaan pembayaran digital, dan pendapatan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk digunakan sebagai acuan dalam pengembangan literatur di bidang keuangan dan inklusi keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan:

Temuan studi dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui edukasi literasi keuangan, serta mempromosikan penggunaan pembayaran digital.

2. Bagi Lembaga Keuangan:

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya meningkatkan layanan keuangan digital dan produk keuangan lainnya untuk memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat urban.

3. Bagi Masyarakat:

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya literasi keuangan, penggunaan pembayaran digital, dan

tingkat pendapatan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan finansial.

